

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Skeptisme Profesional

Standar Audit mensyaratkan bahwa audit dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai untuk pendeteksi kecurangan atau kesalahan dalam laporan keuangan. Untuk mencapainya, audit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan skeptisisme profesional dalam semua aspek perikatan dan kesadaran bahwa kemungkinan kesalahan penyajian material dapat terjadi tanpa memandang pengalaman auditor yang berkaitan dengan integritas serta kejujuran manajemen klien dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

2.1.1.1 Pengertian Skeptisme Profesional

Menurut Menurut Arens et al. (2015:41) Skeptisme profesional yaitu sikap yang mencakup *questioning mind*, waspada terhadap kondisi yang dapat menunjukkan kemungkinan salah saji akibat kecurangan atau kesalahan, dan penilaian kritis atas bukti audit. Singkatnya, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya salah saji yang material apakah karena kecurangan atau kesalahan di semua perencanaan serta pelaksanaan audit.

Menurut TMbooks (2022:299) Skeptisme profesional yaitu sikap yang selalu mempertanyakan informasi dan bukti audit yang dipertimbangkan keandalan

informasi yang digunakan sebagai bukti audit dan pengendalian terhadap penyusunnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa skeptisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan informasi dan bukti audit serta selalu waspada terhadap kondisi yang dapat menunjukkan kemungkinan salah saji akibat kecurangan.

2.1.1.2 Indikator Skeptisme Profesional

Arens et al. (2015:172) menjelaskan beberapa indikator skeptisme profesional sebagai berikut:

1. *Questioning mindset* (pola pikir yang dipenuhi pertanyaan)

Yaitu disposisi untuk menyelidiki sejumlah hal yang dirasa meragukan.

- a. Menolak suatu pernyataan atau statement tanpa pembuktian yang jelas.
- b. Mengajukan banyak pertanyaan untuk pembuktian akan suatu hal.

2. *Suspension of judgement* (menunda untuk mengeluarkan keputusan)

Yaitu karakter skeptis yang mengindikasikan seseorang butuh waktu lebih lama untuk membuat pertimbangan yang matang, dan menambahkan informasi tambahan untuk mendukung pertimbangan tersebut.

- a. Membutuhkan informasi yang lebih lama.
- b. Membutuhkan waktu yang lama namun matang untuk membuat suatu keputusan.
- c. Tidak akan membuat keputusan jika semua informasi belum terungkap.

3. *Search for knowledge* (keingintahuan)

Yaitu karakter skeptis seseorang yang didasari oleh rasa ingin tahu (curiosity) yang tinggi.

a. Berusaha untuk mencari dan menemukan informasi baru.

4. *Interpersonal understanding* (pemahaman interpersonal)

Yaitu pengakuan bahwa motivasi dan persepsi orang dapat membuatnya informasi yang bias atau menyesatkan seseorang berperilaku demikian.

5. *Self confidence* (kepercayaan diri)

Yaitu sikap percaya diri.

6. *Self determination* (keteguhan hati)

Yaitu sikap seseorang untuk menyimpulkan secara objektif atas bukti yang sudah dikumpulkan.

a. Tidak langsung menerima atau membenarkan pernyataan dari orang lain.

b. Menekankan pada suatu hal yang bersifat tidak konsisten (inconsistent).

Berdasarkan penjelasan indikator skeptisme profesional di atas, penelitian ini menggunakan indikator *questioning mindset* (pola pikir yang dipenuhi pertanyaan), *suspension of judgement* (menunda untuk mengeluarkan keputusan), *search for knowledge* (keingintahuan), *interpersonal understanding* (pemahaman interpersonal), *self confidence* (kepercayaan hati), dan *self determination* (keteguhan hati).

2.1.2 Etika Profesi

Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi dalam tatanan global dan tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar atas penyajian Laporan Keuangan, IAPI merasa adanya suatu kebutuhan untuk melakukan percepatan atas

proses pengembangan dan pemuktahiran standar profesi yang ada melalui penyerapan standar Profesi International. Kode Etik Profesi Akuntan Publik adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.

2.1.2.1 Pengertian Etika Profesi

Tandiondong (2016:110) menyatakan etika profesi adalah cara pandang seseorang dalam melakukan pekerjaannya, yang dapat mempengaruhi pertimbangan perilaku etisnya (ethical judgment), yang selanjutnya mempengaruhi keinginan untuk melakukan, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau perbuatan (behaviour).

Menurut Arum Ardianingsih (2021 : 31) Etika profesi adalah pedoman bagi para anggota Institut Akuntan Akuntan publik, untuk bertugas secara bertanggung Jawab dan Objektif.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika profesi adalah cara pandang seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang dapat mempengaruhi pertimbangan perilaku etisnya untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif.

2.1.2.2 Indikator Etika Profesi

Menurut Arum Ardianingsih (2021 : 33) indikator etika profesi sebagai berikut:

1. Integritas

Yaitu perilaku auditor harus dapat bersikap jujur, adil, dan sebenar-benarnya dalam melakukan proses audit.

2. Objektivitas

Yaitu perilaku auditor yang harus selalu bersikap netral dalam menjalankan proses audit, interpretasi bukti audit, dan laporan keuangan yang sudah ditelaah bersama.

3. Kompetensi Profesional dan Kecermatan

Yaitu perilaku auditor yang harus memiliki pengetahuan serta keterampilan sesuai dengan profesionalnya dalam memberikan jasa auditor.

4. Kerahasiaan

Yaitu perilaku auditor yang harus bisa menjaga kerahasiaan informasi.

5. Perilaku Profesional

Yaitu perilaku auditor yang harus profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai prinsip dan nilai-nilai dasar auditor.

Berdasarkan penjelasan indikator skeptisme profesional di atas, penelitian ini menggunakan indikator integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kecermatan, kerahasiaan, perilaku profesional.

2.1.3 Pendeteksi Kecurangan (*Fraud*)

Standar audit memberi pedoman bagi auditor untuk menilai risiko kecurangan. Auditor bertanggung jawab untuk merespon risiko kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa salah saji material dapat terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan.

2.1.3.1 Pengertian Kecurangan (*Fraud*)

Fraud terjadi dimana seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan melalui kecurangan atau penipuan. Kecurangan semacam ini menunjukkan adanya keinginan yang disengaja, tidak termasuk ketidaktahuan (Yarry dan Surtikanti, 2019).

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:61) definisi kecurangan (*fraud*) adalah sebagai berikut:

“Kecurangan adalah mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki serta melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecurangan terjadi dimana seseorang memperoleh kekayaan atau keuntungan keuangan melalui kecurangan atau penipuan, dengan maksud untuk dimiliki serta melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

2.1.3.2 Indikator Kecurangan (*fraud*)

Menurut Association of Certified Fraud Examinations (ACFE2000) indikator kecurangan (*fraud*) terdiri dari :

1. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*),

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial atau kecurangan non finansial.

2. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

3. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

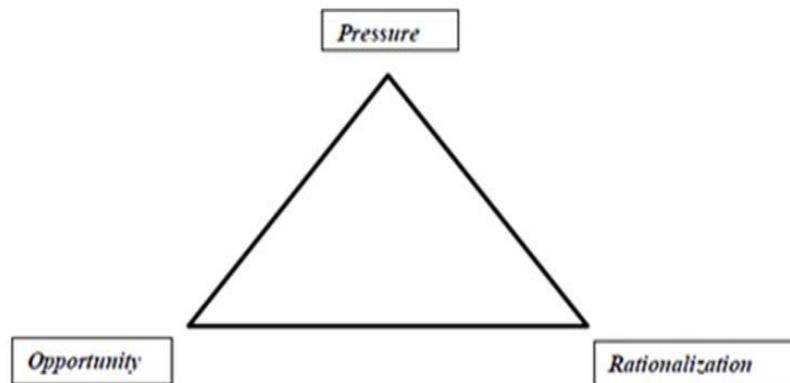
4. Kecurangan yang Berkaitan dengan Komputer (*Computer Fraud*)

Kejahatan di bidang komputer adalah sebagai berikut:

- a) Menambah, menghilangkan, atau mengubah masukan atau memasukkan data palsu.
- b) Salah memposting atau memposting sebagian transaksi saja.

2.1.3.3 Faktor Pendorong Kecurangan (*fraud*)

Amin Widjaja Tunggal (2016:4) menjelaskan beberapa faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan istilah fraud triangle, yaitu:



Gambar 2.1

Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)

Sumber : Amin Widjaja Tunggal (2016:4)

1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seorang berani melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Faktor ini berasal dari individu si pelaku dimana ia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Kesempatan timbul terutama karena lemahnya pengendalian internal untuk mencegah dan pendeteksi kecurangan. Kesempatan juga dapat terjadi karena lemahnya sanksi, dan ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja.

3. Pembenaaran (*Rationalization*)

Pelaku kecurangan mencari pembenaaran antara lain:

- a. Pelaku menganggap bahwa yang dilakukan sudah merupakan hal biasa atau wajar dilakukan oleh orang lain pula.
- b. Pelaku merasa berjasa besar terhadap organisasi dan seharusnya ia menerima lebih banyak dari yang telah diterimanya. Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah, nanti akan dikembalikan.

Sedangkan menurut Ely Suhayati (2022:88) Pada dasarnya terdapat 4 faktor pendukung seseorang untuk melakukan kecurangan yang disebut juga dengan Teori GONE yaitu:

G : Greed (Keserakahan)

O : Opportunity (Kesempatan)

N : Need (Kebutuhan)

E : Exposure (Pengungkapan)

Greed dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan atau disebut sebagai faktor individu, sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan yang disebut faktor generik.

2.1.3.4 Pengertian Pendeteksi Kecurangan (Fraud)

Menurut Karyono (2016:93-94) upaya pendeteksi kecurangan antara lain dilakukan dengan: Pengujian pengendalian intern, merancang dan melaksanakan auditnya, pengumpulan data intelijen, serta dilakukan kaji ulang terhadap penyimpangan dalam kinerja operasi.

Menurut Ely Suhayati (2021:86) untuk mendeteksi *fraud*, seorang auditor internal maupun eksternal harus proaktif pada saat melakukan audit, baik audit secara umum maupun khusus dengan berupaya melihat kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern, terutama yang berkenaan dengan perlindungan terhadap asset yang rawan akan terjadinya fraud, ini adalah bagian dari keahlian yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Apabila dari audit umum (*general audit*) diperoleh adanya temuan audit atau ada tuduhan dari pihak lain atau ada keluhan (*complaint*), auditor harus bersikap reaktif menanggapi temuan, tuduhan atau keluhan tersebut, auditor bereaksi menanggapi temuan audit, tuduhan dan keluhan dan mendalaminya dengan audit investigasi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendeteksi *fraud* seorang auditor internal maupun eksternal harus proaktif pada saat melakukan audit.

2.1.3.5 Indikator Pendeteksi Kecurangan

Menurut Karyono (2016:93-94) indikator pendeteksi kecurangan (*fraud*) terdiri dari :

1. Pengujian pengendalian *intern*.

Meliputi pengujian pelaksanaan secara acak dan mendadak. Hal ini untuk mendeteksi *fraud* yang dilakukan dengan kolusi sehingga pengendalian *intern* yang ada tidak berfungsi efektif.

2. Merancang dan melaksanakan auditnya.

Pada kedua jenis audit itu tidak ada keharusan auditor untuk dapat mendeteksi dan mengungkapkan adanya *fraud*, akan tetapi auditor harus merancang dan melaksanakan auditnya sehingga *fraud* dapat terdeteksi.

3. Pengumpulan data intelijen dengan teknik elisitasi terhadap gaya hidup dan kebiasaan pribadi.

Cara pendeteksian fraud ini dilakukan secara tertutup atau secara diam-diam mencari informasi tentang pribadi seseorang yang sedang dicurigai sebagai pelaku kecurangan.

4. Penggunaan prinsip pengecualian (*exception*) dalam pengendalian dan prosedur. Pengecualian yang dimaksud antara lain:
 - a. Adanya pengendalian intern yang tidak dilaksanakan atau dikompromikan.
 - b. Transaksi-transaksi yang janggal misalnya: waktu transaksi pada hari Minggu atau hari libur lain, jumlah frekuensi transaksi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Tanpa transaksi terlalu menyimpang dari biasanya.
 - c. Tingkat motivasi, moral dan kepuasan kerja terus menerus menurun.
 - d. Sistem pemberian penghargaan yang ternyata mendukung perilaku tidak etis.
5. Pengkajian ulang terhadap penyimpangan
Dari hasil kaji ulang diperoleh penyimpangan yang mencolok dalam hal anggaran, rencana kerja, tujuan, dan sasaran organisasi. Penyimpangan

tersebut bukan karena adanya sebab yang wajar dari aktivitas bisnis yang lazim.

Berdasarkan penjelasan indikator skeptisme profesional di atas, penelitian ini menggunakan indikator pengujian pengendalian *intern*, merancang dan melaksanakan auditnya, pengumpulan data intelijen, penggunaan prinsip pengecualian (*exception*), serta pengkajian ulang terhadap penyimpangan.

2.1.3.6 Langkah-Langkah Pendeteksi Kecurangan (*fraud*)

Menurut Karyono (2016:92) mengemukakan langkah-langkah mendeteksi *fraud* sebagai berikut:

- 1 Langkah awal dari pendeteksian *fraud* adalah memahami aktivitas organisasi dan mengenal serta memahami seluruh sektor usaha. Pada pemahaman aktivitas organisasi ini, sertakan personel yang berpengalaman dalam tim deteksi dan lakukan wawancara dengan personel kunci dari organisasi. Pada pemahaman itu diidentifikasi apakah organisasi telah menerapkan pengendalian intern yang andal baik dalam rancangan struktur pengendalian maupun pelaksanaan. Pengendalian *intern* bukan saja untuk mencegah *fraud*, tetapi dirancang pula untuk dapat mendeteksi fraud secara dini.
- 2 Langkah untuk mendeteksi *fraud* selanjutnya adalah dengan memahami tanda-tanda penyebab terjadinya *fraud*. Tanda-tanda penyebab terjadinya *fraud* berupa berbagai keanehan, keganjilan, dan penyimpangan dari keadaan yang seharusnya serta kelemahan dalam pengendalian *intern*. Tanda-tanda tersebut diperoleh dari berbagai informasi, tetapi hasilnya

masih merupakan tanda-tanda umum yang masih harus dianalisis dan dievaluasi. Bila ada indikasi kuat, dilakukan investigasi terhadap gejala tersebut.

- 3 Pendeteksian selanjutnya dilakukan dengan *critical point of auditing* dan teknik analisis kepekaan (*job sensitivity analysis*). *Critical point of auditing* adalah teknik pendeteksian *fraud* melalui audit atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya. Teknik analisis kepekaan adalah teknik pendeteksian *fraud* didasarkan pada analisis dengan memandang pelaku potensial. Analisisnya ditunjukkan pada posisi tertentu apakah ada peluang tindakan *fraud* dan apa saja yang dapat dilakukan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Skeptisme Profesional Terhadap Pendeteksi Kecurangan

Menurut Arum Ardianingsih (2018:88) Skeptisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan sikap waspada di sepanjang penugasan audit terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Dalam mendeteksi kemungkinan terjadinya *fraud* maka auditor biasanya akan merumuskan W5H2 (*who, what, why, when, where, how, how much*).

Skeptisme yang dimiliki oleh auditor yang begitu tinggi, membuat auditor selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang didapatkannya sehingga informasi yang didapatkannya berguna dalam pendeteksian kecurangan. (Rahim, Muslim, & Amin, 2019).

Hasil penelitian Sari Y.E & Helmayunita N (2018) dan Fadila et al. (2020) menemukan bahwa skeptisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor pendeteksi kecurangan tetapi berbanding terbalik dengan penelitian Ranu (2017) dan Suryanto et al (2017) yang menyatakan bahwa skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksi kecurangan.

2.2.2 Pengaruh Etika Profesi Terhadap Pendeteksi Kecurangan

Ristalia (2015) menyatakan bahwa dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasa disebut sebagai kode etik. Auditor harus mentaati aturan etika dalam melaksanakan tugasnya untuk memudahkan auditor dalam pendeteksi kecurangan. Disini terlihat adanya pengaruh positif pada etika profesi terhadap pendeteksian fraud.

Seorang auditor yang dapat mendeteksi kecurangan hendaknya didukung juga dengan penerapan etika profesi yang baik. Bagi seorang auditor, memiliki pemahaman mengenai etika profesi ini sangatlah penting dalam membantu auditor membuat pertimbangan yang telah dibuatnya, yang dimana hal itu akan memberikan pengaruh bagi seorang auditor dalam menentukan hasil dari sebuah laporan keuangan yang telah diauditnya (Kasdin, 2019:76).

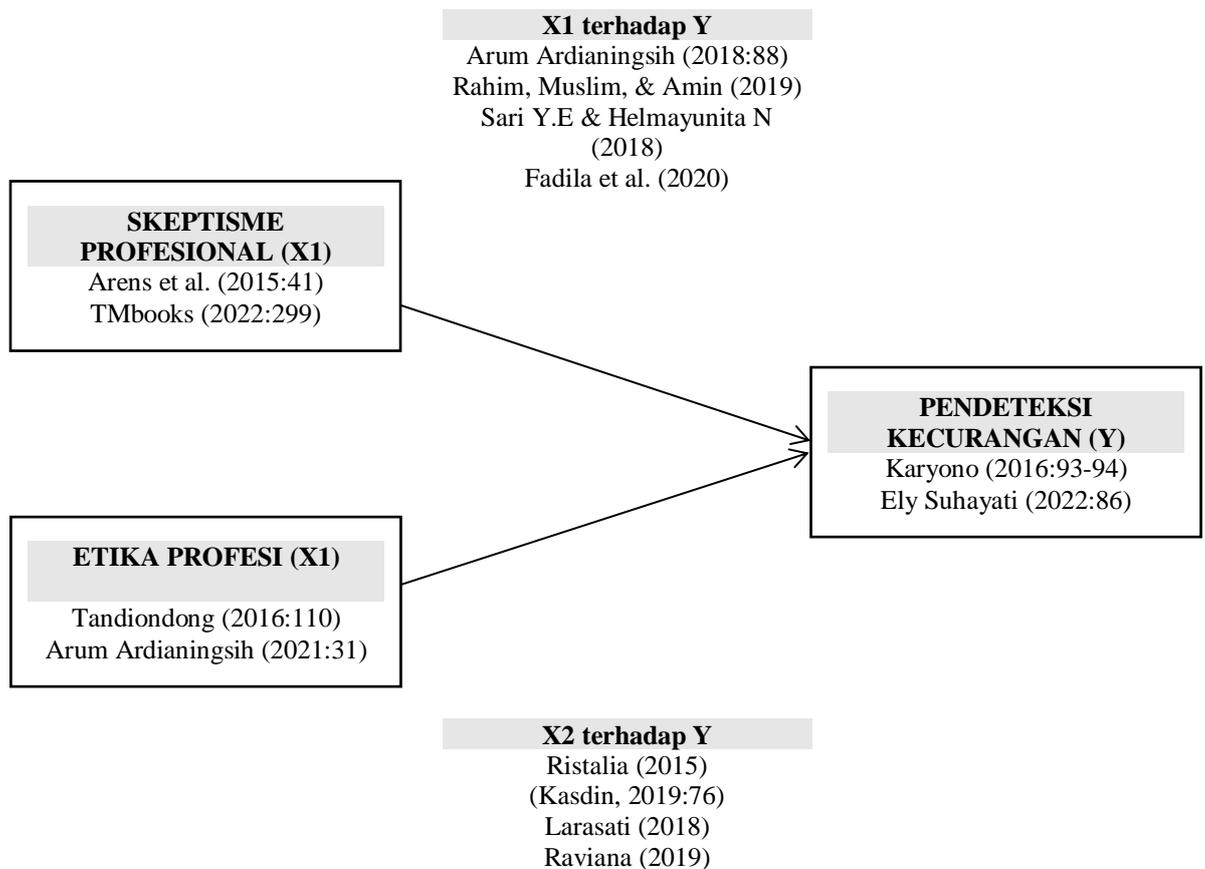
Dalam hal pendeteksian fraud salah satu yang harus ditekankan disini bagaimana seorang Auditor menerapkan etika profesi dalam menjalankan kegiatan auditnya. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi, Pelaku profesi

harus menjaga perilaku sesuai dengan etika yang berlaku sehingga dapat memenuhi standar mutu kerja yang telah ditetapkan.

Penelitian yang diadakan oleh Larasati (2018) dan Raviana (2019) menyatakan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam pendeteksi kecurangan baik secara langsung maupun melalui skeptisisme professional auditor.

2.2.3 Paradigma Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikiran dari penelitian ini dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



2.3 Hipotesis

Sugiyono (2017:70) menyatakan bahwa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta secara empiris.

Berdasarkan pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap Pendeteksi Kecurangan (*fraud*).
- H2 : Etika Profesi berpengaruh terhadap Pendeteksi Kecurangan (*fraud*).